

THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN IMPROVING THE WELFARE OF POOR COMMUNITIES IN TAKALAR DISTRICT

Herlina Sakawati¹, Megawati Azhari², Sulmiah^{3*}

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

Email: sulmiah@unm.ac.id

ABSTRACT

This paper aims to find out how the role of the Social Service in Improving the Welfare of the Poor in Takalar Regency and what Supporting and Inhibiting Factors are encountered in optimizing it. Using a qualitative approach, data collection was carried out through observation, interviews and documentation techniques. The data analysis technique used is interactive data analysis through the stages of: data collection, data reduction, data analysis, and conclusion testing. The results of this study indicate that the role of the Social Service in Improving the Welfare of the Poor in Takalar Regency is based on several indicators: 1. Stabilizers that have not gone well, because the realization of social assistance programs for the poor has not been evenly distributed, 2. Innovators that are running well, due to new innovations from social services as a form of service that can help collect data on the poor effectively, 3. Modernizers that have been going well, this can be seen from the impact of the program provided to the community which is very helpful in meeting the daily needs of the poor, 4. Pioneers that have not gone well, because there is no form of derivative services from the social services themselves that can provide a form of pioneering that has a positive impact on society, 5. The executor himself has not gone well, this is because there is no form of cooperation between social services and other agencies as a form of cooperation in tackling the poor.

Keywords: *Role, Social Service, Welfare, Poor People.*

PENDAHULUAN

Pembangunan kesejahteraan sosial, dan khususnya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara Pusat dengan Pemerintah Daerah. Kemiskinan merupakan program prioritas nasional, dan karenanya memerlukan pemahaman dan komitmen yang sama pada semua jajaran pemerintah. Pemahaman dan komitmen yang sama itulah tentu akan dapat mempercepat pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan sosial. Perhatian terhadap kesejahteraan sosial merupakan hal utama karena keberadaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat berarti. Dimana masyarakat memiliki peranan strategis dalam mengemban tanggung jawab dalam pembangunan bangsa.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, amanatnya bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum (Ngutra, 2017).

Selama ini berbagai masalah sosial utamanya kemiskinan tidak kunjung dapat diatasi, atau paling tidak dikurangi. Tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, masyarakat hidup jauh dari .kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Di dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah

terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Kemiskinan merupakan konsep yang berdimensi ganda (multidimensional), yaitu dimensi ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Secara politik, kemiskinan dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumberdaya. Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan- kesempatan peningkatan produktivitas (Huraerah, 2013).

Berbagai program dan kebijakan dalam penanganan kemiskinan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat dari daerah masih belum menemukan cara tepat untuk mengatasinya, baik dalam kendala maupun sistem yang kurang tepat dalam objek penanganan. Sudah banyak program yang telah ada tetapi belum menyentuh akar dari permasalahan ini. Karena dilihat dari pemberdayaan kaum miskin untuk mengakses sistem sumber yang tersedia. Program yang selama ini lebih berorientasi kepada kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum tepat sasaran, terbukti ketika ada program pemberdayaan yang dilakukan dari nasional maupun pemberdayaan yang dibuat dalam tingkat daerah maupun dari pusat (Haris, 2019).

Setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini di lakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Takalar.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang beribukota di Pattallassang ini memiliki luas wilayah 566,51 km². Seperti halnya kabupaten/kota lain, Kabupaten Takalar juga menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan. Fenomena kemiskinan secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator kemiskinan. Pertama, dengan melihat jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinanm. Kedua, dengan melihat rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Ketiga, dengan melihat sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kemiskinan di Kabupaten Takalar menuntut kehadiran pemerintah, terutama Dinas Sosial Kabupaten Takalar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagaimana diketahui, bahwa salah satu tugas dan fungsi dinas sosial adalah menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, dan salah satunya adalah panggulangan kemiskinan. Peran Dinas Sosial Kabupaten Takalar sebagai lembaga pemerintahan harus dituntut untuk menyelenggarakan berbagai program kesejahteraan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal 4. Pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sosial tersebut memerlukan dukungan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran (APBD) dan manajerial. Berbagai aspek tersebut apabila Dapat dipenuhi, maka tujuan program dapat dicapai secara optimal, dan sebaliknya.

Berikut data kemiskinan kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Data Kemiskinan Kabupaten Takalar 2020-2022

No.	Data Kemiskinan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	25,38	24,60	24,75
2	Persentase Penduduk Miskin	8,44	8,25	8,25
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,09	1,03	0,88

4	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,21	0,17	0,15
5	Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/bulan)	364.378	380.564	399.062

Sumber: BPS Kabupaten Takalar, 2022.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Takalar dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan, adapun data pada BPS kabupaten Takalar bahwa jumlah penduduk Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebanyak 302.695 jiwa dan jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 24,75 ribu jiwa. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin maka pemerintah mengeluarkan kebijakan beberapa program bantuan untuk masyarakat miskin.

Adapun program yang dijalankan pemerintah melalui dinas sosial yaitu program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program kelompok usaha bersama (Kube). Maka dapat dilihat bahwa peran dinas sosial terhadap penanggulangan masyarakat miskin melalui penerapan atau pengimplemetasian program-program bantuan sosial. Program bantuan sosial yaitu PKH, BPNT dan Kube merupakan program bantuan sosial yang peruntukkan untuk masyarakat miskin. program ini dijalankan dinas sosial untuk membantu masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Program bantuan sosial PKH adalah bantuan yang berupa uang tunai, penerima bantuan ini adalah anak sekolah, lansia, Ibu hamil serta balita. Kemudian untuk BPNT adalah jenis bantuan yang berupa sembako yang dikeluarkan setiap satu kali satu bulan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Untuk Program Kube jenis bantuan ini adalah berupa jenis barang yang beragam tergantung jenis usaha yang diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian dilapangan bahwa masih adanya masyarakat yang seharusnya tersentuh program bantuan sosial tersebut tetapi tidak mendapatkan bantuan membuat realiasi pemberian bantuan belum merata. kecenderungan di masyarakat, ketidaksesuaian antara program kemiskinan dengan orang yang dilayani dalam hal ini ada pemberian bantuan kepada masyarakat miskin yang tidak tepat sasaran (orang yang mampu justru dapat bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak tersentuh bantuan dinas sosial). Oleh karena itu diperlukan kebijakan dinas sosial yang lebih efektif agar pemberian bantuan dapat merata dan tepat sasaran guna memajukan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat serta mampu membuat masyarakat yang diberdayakan untuk keluar dari ketidakberdayaan.

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti memasukkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam memecahkan masalah yang terjadi pada Peran Dinas Sosial kabupaten Takalar. meskipun lokus dan permasalahan tidak sama persis, tetapi sangat membantu peneliti dalam menemukan sumber pemecahan masalah pada penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan Indrawardy Hariguna (2021) dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Medan, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indrawardy Hariguna dengan penelitian ini yaitu terletak pada teori dan indikator yang digunakan.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Andi Aslinda, Heni Zainal, & Muhammad Luthfi Siraj (2022) dengan judul penelitian Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Masyarakat dengan Program Produk Kelapa Terpadu di Kecamatan Bujjulu Kabupaten Gowa. Adapun kebaruan ilmiah dari penelitian terdahulu dimana teori yang digunakan berbeda serta penelitian sebelumnya mengkaji melalui pemberdayaan masyarakat sedangkan penelitian ini melihat sejauh mana penerapan program dari dinas sosial Kabupaten Takalar.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh oleh Dasril Arifin (2013), dengan judul penelitian Peran Dinas Sosial terhadap Penanggulangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Siak (Studi kasus di Kecamatan Sei Mandau). Adapun kebaruan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta teori yang digunakan juga berbeda.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, penulis melakukan penelitian yang mendalam tentang “Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kabupaten Takalar”.

METODE

Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga disebut juga penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas sosial kabupaten Takalar yang terletak pada Jalan Abdul Jalal Dg Leo, Kalabbirang, Kec. Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu Data primer yang dimaksudkan adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara peneliti dengan informan atau narasumber. Serta, Data Sekunder (sumber data tertulis), yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dari berbagai literatur-literatur yang ada yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dibahas, buku-buku atau referensi-referensi teoritis, peraturan perundang-undangan, doktrin dari berbagai pakar dan data-data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari : Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Takalar, Staf Pengadministrasian umum, serta masyarakat penerima bantuan. Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri.

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data merupakan tahapan untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan cara triangulasi dan Member Check. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Stabilisator

Selaku Stabilisator, pemerintah adalah stabilisator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan lancar (Atmoko, 2013). Oleh, karena itu, adanya Stabilisator akan mendukung bagaimana Dinas sosial bisa menjaga stabilitas penanganan kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di kabupaten Takalar.

Jadi untuk mengukur bagaimana Dinas sosial mengatasi kemiskinan dilihat dari upaya apa yang dilakukan Dinas Sosial sehingga kemiskinan dapat berkurang. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam rangka menekan kemiskinan di kabupaten Takalar yaitu bekerja dengan efektif dengan menjalankan program bantuan dari Kementerian sosial dengan baik yaitu program bantuan PKH, BPNT dan Kube. Kemudian melakukan pembinaan khusus untuk program bantuan Kube dengan memberikan bimbingan terkait usaha apa yang akan dilakukan dan bagaimana pengelolaan modal yang diberikan oleh pemerintah dan upaya selanjutnya yaitu melakukan pendataan yang sesuai dengan penetapan keluarga penerima manfaat artinya masyarakat yang didata sesuai dengan ketentuan kriteria penerima bantuan untuk masyarakat miskin.

Adapun ketetapan penetapan penerima manfaat yang memiliki 8 kriteria berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/Huk/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari- hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:

- a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;

- f. tempat tinggal sebagian besar ber dinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng
- g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
- h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.

Kriteria tersebut tidak sejalan dengan penerima bantuan yang ada, masih adanya masyarakat penerima bantuan yang tidak masuk pada kriteria tersebut yang membuat realisasi bantuan tidak tepat sasaran. Hal tersebut yang membuat upaya yang dilakukan dinas sosial tidak berjalan dengan efektif. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa peran dinas sosial selalu stabilisator belum terlaksana dengan baik hal tersebut karena tidak selarasnya hal yang disampaikan oleh pegawai dinas sosial dengan fakta yang terjadi dilapangan.

2. Inovator

Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting adalah cara berpikir baru (Siagian, 2000). Dengan demikian selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru tersebut. Berdasarkan pendapat dari Sondang P. Siagian tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Takalar telah berpindah dari sistem lama menjadi sistem baru yaitu dengan adanya inovasi baru seperti aplikasi SIKS-NG.

Aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) merupakan salah satu aplikasi yang dapat merubah dan mengusulkan warga ke dalam DTKS maupun kepesertaan Program Bansos. Aplikasi SIKS-NG adalah aplikasi yang berbasis android yang dapat diinstal pada play store. Aplikasi ini sebagai sarana untuk melakukan verifikasi data terpadu agar lebih tepat sasaran dan dapat menunjukkan lokasi dan foto-foto kondisi keluarga yang masuk data terpadu.

Adapun fungsi dari aplikasi SIKS-NG adalah menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Perbaikan data dari lapangan dikelola melalui SIKS-NG yang kemudian dimanfaatkan untuk perencanaan, pengambilan keputusan dan penyaluran bantuan sosial/subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan ini tidak hanya ditentukan oleh program-program yang inovatif secara tepat, tetapi data yang akurat dan terkini. Aplikasi SIKS-NG diciptakan dalam rangka mengumpulkan data yang up to date untuk seluruh Dinas Sosial di Indonesia, namun aplikasi ini memiliki kekurangan yaitu banyak fitur aplikasi yang kurang sempurna diantaranya tidak bisa mengetahui jumlah data masyarakat meninggal, masyarakat yang pindah, dan tidak ditemukan. Akses data untuk hal tersebut dihitung manual.

Adapun jumlah Desa atau Kelurahan di Kabupaten Takalar yang memiliki operator SIKS-NG yang berperan mendata masyarakat kemudian menginput data masyarakat tersebut kedalam aplikasi SIKS-NG sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Pattalassang	9 Kelurahan	-
2.	Polongbangkeng Selatan	6 Kelurahan	4 Desa
3.	Polongbangkeng Utara	6 Kelurahan	12 Desa
4.	Mappakasunggu	4 Kelurahan	5 Desa
5.	Sanrobone	-	6 Desa
6.	Mangngarabombang	1 Kelurahan	16 Desa
7.	Galesong	-	14 Desa
8.	Galesong Selatan	-	12 Desa
9.	Galesong Utara	1 Kelurahan	9 Desa
Jumlah		27 Kelurahan	78 Desa

Tabel tersebut menunjukkan ada 27 kelurahan dan 78 desa di Kabupaten Takalar, jadi jumlah operator SIKS-NG ada 105, dari wawancara bersama pegawai dinas sosial bahwa

operator SIKS-NG masing-masing memiliki 1 untuk setiap desa/kelurahan di Kabupaten Takalar.

Inovasi ialah sesuatu yang baru yaitu dengan memperkenalkan dan melakukan praktik atau proses baru (barang atau layanan) atau bisa juga dengan mengadopsi pola baru yang berasal dari organisasi baru (Nurdin,2016).

Membahas mengenai pendapat dari Nurdin yang mengatakan bahwa inovasi berarti mengadopsi pola baru dari organisasi baru, dalam hal ini kaitannya terhadap penelitian ini bahwa dinas sosial mengadopsi pola baru yang seperti penerapan aplikasi SIKS-NG untuk pendataan masyarakat miskin guna mengumpulkan data yang lebih akurat.

Prakondisi yang terpenuhi agar peran pemerintah sebagai inovator dapat berjalan secara efektif antara lain:

- a. Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi
- b. Menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintahan terlebih dahulu
- c. Inovasi yang sifatnya kondepsional
- d. Inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja.

Dinas Sosial kabupaten Takalar telah berhasil menjalankan perannya selaku inovator. Sebelumnya dinas sosial hanya menerapkan sistem lama dengan pendataan manual masyarakat miskin, kini beralih menggunakan aplikasi dalam mengumpulkan data-data masyarakat guna mendapatkan data yang lebih akurat

3. Modernisator

Selaku modernisator bahwa pemerintah seperti halnya Dinas Sosial bertindak untuk mengantarkan rakyat yang sedang membangun menuju modernisasi melalui pengembangan Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Untuk melakukan pengembangan terhadap SDM suatu daerah hal dasar yang harus diperhatikan seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah tingkat pendidikan daerah tersebut.

Untuk mengukur peran dinas sosial selaku modernisator maka dilihat dari output atau dampak program yang telah diberikan kepada masyarakat apakah program tersebut sudah memberikan dampak yang membuat kehidupan masyarakat lebih maju atau sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan peneliti bahwa dampak dari pemberian program bantuan sosial ini dengan menurunnya kemiskinan di Kabupaten Takalar untuk beberapa tahun. Berikut data penerima bantuan sosial di Kabupaten Takalar:

Tabel 4 Jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Takalar

No.	Program Bantuan	Tahun			Jumlah
		2020	2021	2022	
1	PKH	16.332	17.081	17.919	51.332
2	BPNT	32.548	36.625	69.259	68.807
3	KUBE	20	-	-	20

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan sosial di Kabupaten Takalar mengalami peningkatan, walaupun untuk pemberian bantuan Kube pada dua tahun terakhir kosong itu disebabkan tidak adanya anggaran dari pusat. Melihat meningkatnya jumlah penerima bantuan membuat kemiskinan di Kabupaten Takalar membuat kemiskinan angka kemiskinan juga berkurang. Kemudian dampak dari bantuan PKH untuk bidang pendidikan membuat indeks pendidikan di kabupaten Takalar juga mengalami peningkatan. Adapun output dari pemberian bantuan program keluarga Harapan untuk kategori pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Takalar

Indikator	Indeks Pendidikan kabupaten Takalar		
	2020	2021	2022
Harapan Lama sekolah (HLS)	12,41	12,42	12,48
Rata-rata Lama sekolah (RLS)	7,29	7,49	7,64
Indeks Pendidikan	67,31	67,72	68,31

Sumber BPS Kabupaten Takalar, 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa indeks pendidikan di Kabupaten Takalar selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa terjadi proses pembangunan manusia kearah lebih baik dari sisi pendidikan masyarakat.

Tingkat pendidikan dapat menggambarkan mutu/kualitas sumber daya manusia. Peningkatan pendidikan ini tidak terlepas dari kerjasama baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat. Jadi dapat dilihat pemberian bantuan PKH untuk bidang pendidikan memberikan pengaruh yang signifikan hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya jumlah harapan lama sekolah di Kabupaten Takalar, hal tersebut tidak terlepas dari bantuan dari program yang diberikan pemerintah guna memenuhi kebutuhan sekolah para siswa miskin.

Jadi peran Dinas Sosial selaku modernisator yang mana modernisator berarti membawa kehidupan masyarakat jauh lebih modern dan maju. Dengan melihat output atau dampak dari bantuan yang diberikan. Melihat meningkatnya jumlah penerima bantuan membuat kemiskinan di Kabupaten Takalar membuat kemiskinan angka kemiskinan juga berkurang. Kemudian dampak dari bantuan PKH untuk bidang pendidikan membuat indeks pendidikan di kabupaten Takalar juga mengalami peningkatan. Jadi dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Sosial telah berhasil menjalankan perannya selaku modernisator.

4. Pelopor

Pelopor yang dimaksud dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan guna memberikan pelayanan yang efektif untuk masyarakat.

Aparatur pemerintah harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini dinas sosial menjadi pelopor, kepeloporan tersebut seperti memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pemberian dampak positif bagi masyarakat ini dapat dilihat dengan adanya layanan turunan atau layanan yang memang diciptakan sendiri dari dinas sosial kabupaten Takalar. Bentuk layanan sebagaimana dimaksud diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Namun dari hasil wawancara bersama beberapa informan tersebut dapat diketahui berdasarkan apa yang dikatakan informan bahwa tidak ada layanan khusus atau bentuk layanan yang diciptakan sendiri oleh dinas sosial yang ada hanya program dari pusat saja yang dijalankan dinas sosial.

Jadi peran Dinas Sosial Kabupaten Takalar selaku pelopor dapat dikatakan belum berhasil hal tersebut dikarenakan tidak adanya bentuk kepeloporan dari dinas sosial seperti bentuk layanan turunan dari dinas sosial yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

5. Pelaksana Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Pemerintah dituntut untuk memainkan peranan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat maka makin berkurang pula intensitas peranan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama informan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berbicara mengenai pengentasan kemiskinan itu tidak hanya menjadi beban dinas sosial sendiri. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa kemensos adalah klaster pertama dalam program penanggulangan kemiskinan yang kemudian turun menjadi tugas Dinas Sosial

selaku instansi dibawah naungan kementerian sosial yang bertugas menanggulangi masalah kemiskinan di daerah.

Dinas Tenaga kerja juga memiliki peran dalam menurunkan kemiskinan karena jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi, maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan tingkat pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka tingkat kemiskinan juga rendah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial selaku pelaksana sendiri belum berhasil hal tersebut dikarenakan tidak adanya bentuk program kerjasama antar instansi seperti dinas sosial dan dinas tenaga kerja dalam menanggulangi masalah kemiskinan di kabupaten Takalar.

Tabel 6 Hasil Indikator Penelitian

Indikator	Baik	Kurang Baik
Stabilisator		✓
Inovator	✓	
Modernisator	✓	
Pelopor		✓
Pelaksana Sendiri		✓

Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam optimalisasi peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di kabupaten Takalar

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan peran Dinas Sosial salah satunya berasal ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan kegiatan dalam pemberian bantuan masyarakat miskin. Ketersediaannya anggaran sangat mempengaruhi proses kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi faktor pendukung dalam proses peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Takalar adalah ketersediaan anggaran.

Sedangkan faktor penghambat dalam mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Takalar adalah proses pendataan yang tidak profesional, hal ini disebabkan karena proses pendataan sekarang yang melalui operator desa/kelurahan masing-masing, namun penerima bantuan terkadang ada yang tidak sesuai tidak tepat sasaran. proses pendataan yang dilakukan yaitu karena setiap desa/kelurahan memiliki operator yang melakukan pendataan masyarakat miskin maka untuk hal pendataan itu diambil alih oleh operator tersebut yang kemudian melihat kondisi masyarakat yang berhak di data.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan mengenai peran dinas sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Takalar dalam indikator Stabilisator yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan realisasi program bantuan sosial untuk masyarakat miskin belum sepenuhnya merata. Inovator yang berjalan sudah berjalan dengan baik, dikarenakan adanya inovasi baru dari dinas sosial sebagai bentuk layanan yang dapat membantu pendataan masyarakat miskin dengan efektif. Modernisator yang sudah berjalan dengan baik, hal tersebut dilihat dari dampak program yang diberikan ke masyarakat sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat miskin. Pelopor yang belum berjalan dengan baik, dikarenakan tidak ada bentuk layanan turunan dari dinas sosial sendiri yang dapat memberikan bentuk kepoloporan yang membawa dampak positif untuk masyarakat. Serta Pelaksana Sendiri yang belum berjalan dengan baik, hal tersebut karena tidak ada bentuk kerjasama dinas sosial dengan instansi lain sebagai bentuk kerjasama dalam penanggulangan masyarakat miskin.

Adapun saran untuk dinas sosial Kabupaten Takalar adalah Dinas sosial Kabupaten Takalar, diharapkan melakukan pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan kriteria penerima manfaat, Melakukan pendataan masyarakat miskin dengan melihat kondisi masyarakat yang

sebenarnya sehingga realisasi pemberian bantuan tepat sasaran, Kualitas aplikasi SIKS-NG lebih ditingkatkan agar tidak menjadi kendala saat pendataan dilakukan, Program-program yang telah dijalankan dan dilakukan perlu adanya sistem kontrol, pengawasan dan evaluasi secara baik dan Penempatan sumber daya manusia pada kantor dinas sosial diharapkan sesuai dengan bidang masing-masing

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, D. (2013). *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan angka Kemiskinan Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Di Kecamatan Sei Mandau)*. (Doctoral Disertation, Universitas Negeri sultan Syarif Kasim Riau)
- Faizal, B. (2002). *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Feronica Bormasa, M. (2017). Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Harapan Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(20).
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Policy Strategy of Tackling Poverty in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 12(1), 1–13.
- Latifah, D., & Mulyana, N. (2017). Peran Pendamping Bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHA). *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Nalle, F. W., & Kiha, E. K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). In *JDEP* (Vol. 1, Issue 3).
- Ngutra, T. (2017). Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar. *Jurnal Sosial*.
- Sondang Siagian. (2000). *Administrasi Pembangunan* Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soraya, I. (2017). *Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar* (Disertasi Doktor, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep teori & aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Suryawati, C. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 08 Nomor 3.